

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam Persaingan Usaha*, Asswaja Pressindo, Yogyakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sekretariat Dewan kelautan Indonesia, 2009, *Analisi kebijakan pelayaran dalam rangka pemberdayaan pelayaran nasional*, Satuan kerja DKI Setjen, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Janus Sidabalek, 2006, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo dalam muhammad sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum kesehatan teori dan aplikasinya*, Kencana prenada Media Group, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2006, *Hukum persaingan usaha (Filosofi, teori dan implikasi penerapan di Indonesia)*, Malang Bayu Media
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum persaingan Usaha (Teori dan praktiknya di Indonesia)*, PT Rajagravindo Persada, Jakarta
- Ningrum Natasya Sirait, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia; Uu No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan
- Muhammad Hadi Susanto, 2009, *Monopoli atas Essential Facility Oleh Badan Udara dalam Perspektif Hukum Persaingan*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta
- Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Jonker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit PT. Alumni Bandung, Bandung

Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat lalu Lintas dan Angkutan Laut, 2015 - 2019, *Rencana Strategis*, Jakarta,

Fahri Hamzah, 2007, *Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Yayasan faham Indonesia, Jakarta

Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kementerian Perhubungan, 2016, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta

Menteri Perhubungan, “*Dukungan Kemenhub dalam Nawa Cita Tol Laut*”, bahan paparan, Rapat Terbatas Kabinet, Jakarta, 29 Maret 2016

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, LN No 75 Tahun 1959.

_____, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

_____, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

_____, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

_____, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

_____, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

_____, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3731).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

_____, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2015)

_____, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015)

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2012)

_____, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaaingan Usaha.

3. Internet

- Rudi Hartono, "Makna "Dikuasai Oleh Negara" Dalam Pasal 33 UUD 1945", <http://www.berdikarionline.com/makna-“dikuasai-oleh-negara”-dalam-pasal-33-uud-1945/>, diakses tanggal 4 Juni 2017
- Pengertianmenurutparaahli.net, "pengertian infrastruktur", <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-infrastruktur-dan-contohnya/>, diakses tanggal 31 Mei 2017
- Laras Arumsari, "GBHN (Garis Besar Haluan Negara)", http://www.academia.edu/9279832/G_B_H_N_GARIS_GARIS_BESAR_HALUAN_NEGARA, 20 April 2017
- Rizkie Maulana, "Kebijakan Publik:Sebuah Konsep", <http://rizkie-library.blogspot.co.od/2015/12/kebijakan-publik-sebuah-konsep.html?m=1>, diakses tanggal 4 Juni 2017
- HLZ, "Operator Kapal Perintis Swasta: Batalkan Penunjukan Pelni!" <http://translogtoday.com/2016/01/04/operator-kapal-perintis-swasta-batalkan-penunjukan-pelni>, Diakses 04 Januari 2017
- Agus Susanto, "Pelni Layani Perintis untuk Tol Laut"**
<http://print.kompas.com/baca/ekonomi/sector-riil/2016/01/13/Pelni-Layani-Perintis-untuk-Tol-Laut> 13 Januari 2017
- Jamaluddin Mahasari, *Pengertian "Keadilan" (diambil dari pendapat para ahli)*, <https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses 3 Juni 2017
- ¹ Mardety Mardinsyah, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://www.hermeneutikafeminisme.com/2017/03/08/teori-keadilan-john-rawls/>, diakses 1 Juni 2017